



**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

## KATA PENGANTAR

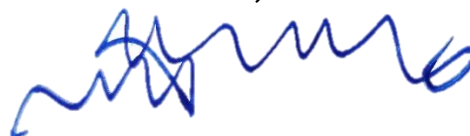
Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2021 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2021 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Periode 2019 – 2024. Penyusunan RENJA Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2021 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Juli 2020

**KEPALA DINAS,**



**Dr. AGUS NOMPITU, S.E., M.T.P.**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670831 199303 1 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
II. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 S/d triwulan IV .....	5
2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2019 .....	11
III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2021 .....	13
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD .....	14
3.3 Isu-Isu Stategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	15
IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 .....	17
4.1 Program dan Kegiatan.....	17
V. PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENJA Tahun 2019 s/d triwulan IV .....	5
Tabel 2.2. Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2019 s/d Triwulan IV berdasarkan IKU 2015-2019.....	11
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2019 s/d Triwulan IV berdasarkan IKU 2019-2024.....	12
Tabel 3.1 Indikator Kinerja dan Target Sasaran Tahun 2020 .....	15

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Lampung untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2021 yang diselaraskan dengan tema pembangunan nasional 2021 dan prioritas pembangunan nasional 2021 serta tema pembangunan dan Provinsi Lampung 2021 dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung 2021.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan RENJA Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2021.

#### **1.3.2 Maksud**

Tujuan Penyusunan RENJA Tahun 2021 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2021 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Pemerintah Provinsi Lampung.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

##### **1.4.2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019**

Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

##### **1.4.3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRA DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat analisis kebijakan nasional dan provinsi, sasaran dan tujuan serta rencana program dan kegiatan tahun 2021.

##### **1.4.4 BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja Dinas Koperasi dan UKM, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.



## II. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja OPD Tahun 2019 s/d Triwulan IV

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja perprogram tahun 2019. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2019 dengan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan di tahun 2019 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

Tabel 2.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Renja Tahun 2019 s/d Triwulan IV

NO	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		PREDIKAT KERJA	
		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100	98,73	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM	100	47,37	Sangat Tinggi	Rendah
3	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	100	99,82	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100	99,77	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100	96,70	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	94,40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
8	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	98,13	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	100	97,63	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
<b>RATA-RATA JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>93,70</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Dari 9 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran sangat tinggi dikarenakan adanya tersedianya anggaran

untuk pelaksanaan program/kegiatan. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu 100 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2019 dapat dilihat pada uraian berikut :

**Program Utama (4 Program) terdiri dari :**

**1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM Rp. 650.906.200 ,- terdiri dari 8 kegiatan yaitu :**

1. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS Rp. 81.002.874,- dengan target kinerja 30 koperasi yang dinilai kesehatannya. Terealisasi Rp. 80.598.550,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
2. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM Rp. 123.982.500,- dengan target kinerja 2 kali temu konsultasi. Terealisasi Rp. 123.059.700,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
3. Sosialisasi IUMK 15 kab/kota Rp. 141.288.000,- dengan target kinerja 15 kali sosialisasi. Terealisasi Rp. 140.355.200,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
4. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah Rp. 115.181.000,- dengan target kinerja 1 kali pameran. Terealisasi Rp. 109.644.500,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
5. Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) Rp. 75.851.200,- dengan target kinerja 50 orang yang didampingi PLUT. Terealisasi Rp. 75.851.200,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
6. Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan Rp. 22.752.750,- dengan target kinerja 30 orang peserta sosialisasi. Terealisasi Rp. 22.752.630,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
7. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan pekulakan Rp. 46.814.556,- dengan target kinerja 15 koperasi yang mendapat kemitraan baru. Terealisasi Rp. 46.335.556,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
8. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah Rp. 44.033.320,- dengan target kinerja 1 perusahaan. Terealisasi Rp. 44.033.216,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

**2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Rp. 623.127.126,- terdiri dari 2 kegiatan yaitu**

1. Peningkatan pelayanan PPK BLUD Rp. 586.105.000,- dengan target kinerja 12 bulan. Terealisasi Rp. 258.174.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen
2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD Rp. 37.022.126,- dengan target kinerja 180 KUMKM yang termonitoring. Terealisasi Rp. 37.022.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

**3. Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM Rp. 3.071.256.470,- terdiri dari 2 kegiatan yaitu :**

1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Rp. 2.921.420.000,- dengan target kinerja 780 orang dilatih. Terealisasi Rp. 2.918.876.550,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
2. Monitoring dan evaluasi pengembangan sdm koperasi Rp. 149.836.470,- dengan target kinerja 180 orang peserta pelatihan dimonitoring. Terealisasi Rp. 146.814.300,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

Pelatihan yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp. 2.921.420.000,- digunakan untuk melaksanakan 23 pelatihan dengan total peserta sebanyak 780 orang dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>DIKLAT DAN PELATIHAN</b>	<b>JUMLAH PESERTA</b>	<b>LOKASI</b>
1	Bimbingan teknis bagi tenaga pendamping	20 Orang	Bandar Lampung
2	Pelatihan manajemen bagi umkm	35 Orang	Bandar Lampung
3	Pelatihan kewirausahaan kelompok pemuda	40 Orang	Bandar Lampung
4	Pelatihan menejemen usaha bagi kelompok wanita	40 Orang	Bandar Lampung
5	Pelatihan perkuatan modal dan kelayakan usaha	35 Orang	Bandar Lampung
6	Pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi dan penilaian ksp/usp	35 Orang	Bandar Lampung
7	Pelatihan audit koperasi	40 Orang	Bandar Lampung
8	Pelatihan akutansi koperasi berbasis komputer akt 1	35 Orang	Bandar Lampung
9	Pelatihan akutansi koperasi berbasis komputer akt 2	35 orang	Bandar Lampung
10	Pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus/pengawas dalam (RAT)	35 Orang	Bandar Lampung
11	Pelatihan pengawasan bagi pengawas koperasi	35 Orang	Bandar Lampung

NO	DIKLAT DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	LOKASI
12	Pelatihan kompetensi pengendalian intern	35 Orang	Bandar Lampung
13	Pelatihan kompetensi kabag pinjaman/pembiayaan	35 Orang	Bandar Lampung
14	Pelatihan sertifikasi kompetensi untuk produk halal UMKM	35 Orang	Bandar Lampung
15	Pelatihan kompetensi bagi manajer/kepala cabang	35 Orang	Bandar Lampung
16	Pelatihan kompetensi analis pinjaman/pembiayaan	35 Orang	Bandar Lampung
17	Pelatihan akutansi koperasi di Lampung Barat	30 Orang	Lampung Barat
18	Pelatihan tatalaksana RAT koperasi di Pesisir Barat	30 Orang	Pesisir Barat
19	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman di Way Kanan	30 Orang	Way Kanan
20	Pelatihan akutansi koperasi di Mesuji	30 Orang	Mesuji
21	Pelatihan pertanggungjawaban pengurus koperasi di Pringsewu	30 Orang	Pringsewu
22	Pelatihan berbasis e-commerce bagi UMKM	35 Orang	Bandar Lampung
23	Pelatihan digital marketing bagi KUMKM	35 Orang	Bandar Lampung

**6. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM Rp. 211.926.500,- yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu :**

1. Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi Rp. 102.318.500,- dengan target kinerja 1 even harkop. Terealisasi Rp. 102.308.850,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
2. Koordinasi kelembagaan dan up-dating data keragaan koperasi Rp. 34.608.000,- dengan target kinerja 15 kali. Terealisasi Rp. 34.311.800,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
3. Peningkatan kualitas tata laksana kperasi melalui perizinan koperasi simpan pinjam Rp. 75.000.000,- dengan target kinerja 50 koperasi. Terealisasi Rp. 74.817.400,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

**Program Penunjang (5 program) terdiri dari :**

**1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran Rp. 1.306.207.511,- terdiri dari 11 kegiatan yaitu:**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 340.839.591,- dengan target kinerja jumlah pembiayaan penyediaan jasa komunikasi,

- sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 312.001.915,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 466.800.000,- dengan target kinerja jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 455.380.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
  3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 120.000.000,- dengan target kinerja jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 119.600.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
  4. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 23.506.400,- dengan target kinerja jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 22.889.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
  5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 4.419.600,- dengan target kinerja jumlah pembiayaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 4.379.600,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
  6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 17.280.000,- dengan target kinerja jumlah pembiayaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 17.130.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
  7. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 21.092.000,- dengan target kinerja jumlah pembiayaan penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 20.979.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
  8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. 69.883.920,- dengan target kinerja jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 10 kali. Terealisasi Rp. 69.826.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
  9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 53.904.000,- dengan target kinerja jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah sebanyak 18 kali. Terealisasi Rp. 53.334.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

10. Pameran dan promosi pembangunan Rp. 183.750.400,- dengan target kinerja jumlah pameran dan promosi yang di ikuti dengan target 1 even. Terealisasi Rp. 183.006.400,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
11. Penatausahaan barang milik daerah Rp. 4.601.600,- dengan target kinerja 4 dokumen. Terealisasi Rp. 4.601.600,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 156.879.316,- terdiri dari 2 kegiatan yaitu:**

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 141.029.316,- dengan target kinerja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 132.238.696,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 15.850.000,- dengan target kinerja pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 15.850.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

**3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Rp. 115.200.000,- terdiri dari 1 kegiatan yaitu :**

1. Pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai Rp. 115.200.000,- dengan target kinerja 12 bulan. Terealisasi Rp. 115.200.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 124.273.889,- terdiri dari 5 kegiatan yaitu :**

1. Penyusunan laporan keuangan Rp. 7.031.036,- dengan target kinerja jumlah pembiayaan penyusunan laporan keuangan selama 12 bulan. Terealisasi Rp. 7.030.700,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
2. Penyusunan Renstra Rp. 8.042.679,- dengan target kinerja jumlah dokumen renstra sebanyak 1 dokumen. Terealisasi Rp. 80.14.679,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
3. Penyusunan data kepegawaian Rp. 40.100.200,- dengan target kinerja 12 bulan. Terealisasi Rp. 39.788.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

4. Penyusunan laporan capaian kinerja Rp. 25.599.974,- dengan target kinerja 11 dokumen tersusun. Terealisasi Rp. 25.581.974,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.
5. Monev dan sinkronisasi program Rp. 43.500.000,- dengan target kinerja 4 kali monev dan sinkronisasi program. Terealisasi Rp. 41.533.200,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

**5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Rp. 60.133.988,- terdiri dari 1 kegiatan yaitu :**

1. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Rp. 60.133.988,- dengan target kinerja 1 dokumen tersusun. Terealisasi Rp. 58.707.630,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.

**2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2019**

Capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM Povinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2019 s/d Triwulan IV berdasarkan IKU 2015-2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2019	REALISASI	Tingkat Capaian (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1. Meningkatkan jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	100 %	99,77 %	99,77 %
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	100 %	99,38 %	99,38 %
		3. Meningkatkan standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	3 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	100 %	96,71 %	96,71 %

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2019 s/d Triwulan IV berdasarkan IKU 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2019	REALISASI	Tingkat Capaian (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1. Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	18,98 %	17,30 %	91,14 %
			2. Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi	4,42 %	9,33 %	211,08 %
		2. Meningkatkan wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Jumlah wirausaha pemula	125	128	102,4 %
			2. Jumlah UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya	654	735	112,38 %

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah cukup baik walaupun dari indikator yang ada masih belum memenuhi harapan dimana persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif yang ditargetkan naik sebesar 100 persen tercapai sebesar 99,7 persen, persentase pertumbuhan wirausaha baru dari target 100 persen telah tercapai sebesar 99,38 persen dan Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten dari target 100 persen telah tercapai 96,71 persen. Hal ini bisa dimaklumi dikarenakan data yang ada adalah data pencapaian sampai dengan September 2019 sedangkan periode September s/d Desember menggunakan IKU yang baru yaitu sebagaimana tergambar dalam tabel 3.4 diatas.



### III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2021

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Guna mewujudkan kesinambungan pembangunan, pemerintah telah merancang prioritas pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2021 mendatang. Oleh karenanya, Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung suksesnya pencapaian prioritas nasional yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonom

Sejalan dengan Prioritas Nasional dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021 maka pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Tema Pembangunan Tahun 2020 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Menuju Lampung Berjaya”**.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan pembangunan, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang 6 (enam) Prioritas Pembangunan dimana terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Lampung, masuk dalam mengemban Prioritas Pembangunan ke 3 (tiga) yaitu **“Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan”**. Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021.

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, Berbudaya
6. Pengelolaan lingkungan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

### **3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD**

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024, ada 1 (satu) tujuan yang akan di capai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi”**

Sedangkan Sasaran Utama Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang akan di lakukan pada tahun 2021 yaitu:

1. Meningkatkan Tatakelola Organisasi dan Kinerja Koperasi Yang Profesional dan Akuntabel
2. Meningkatkan Wirausaha UMKM yang Tangguh Dan Mandiri
3. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung)

Selengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2020	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2020		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase pertumbuhan Koperasi Aktif (%)	4,4	1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1	Persentase koperasi yang memiliki kategori sehat (koperasi primer provinsi)	25,00
						2	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi (%)	5,64
		2	Perentase Pertumbuhan Jumlah UMKM (%)	2,0	1. Meningkatkan wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1	Persentase penumbuhan wirausaha pemula	93
						2	Persentase UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk dan Kualitas SDM nya	91

### 3.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan utama terkait dengan Pengelolaan Koperasi dan UMKM adalah Rendahnya Daya Saing Koperasi dan UMKM serta Iklim Usaha yang Belum Kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Selain itu beberapa masalah lain seperti rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UMKM masih rendah, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi juga mempengaruhi kinerja Koperasi dan UMKM. Berdasarkan uraian dan permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan

pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya koperasi tidak aktif.
2. Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi, dan UKM.
3. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global.
4. Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM.
5. Lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan).
6. Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM.
7. Belum optimalnya penyerapan lapangan kerja disektor Koperasi dan UKM.
8. Masih rendahnya inovasi dan keterampilan sdm (pelaku) dalam pengembangan UKM.
9. Rendahnya kapasitas lembaga pelayanan permodalan dalam menunjang kinerja UKM.
10. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparaturnya Koperasi dan UKM.

## IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

### 4.1 Program dan Kegiatan

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 ini berdasarkan **Kepmendagri nomor 050-3708 Tahun 2020** tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dengan anggaran tersebut diatas direncanakan akan digunakan untuk menjalankan 8 (delapan) program dan 15 (Lima belas) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Berikut ini adalah rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 :

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 13.986.685.000,00,- terdiri dari 7 kegiatan yaitu:**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 177.280.800,- Indikatornya adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD sebanyak 100 Persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 110.060.000,-
  - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 67.220.800,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.818.300.000,- Indikatornya adalah Terlaksananya administrasi Keuangan OPD sebanyak 12 bulan. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.788.300.000,-
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,-
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 108.874.000,- Indikatornya adalah Terlaksananya administrasi

Kepegawaian OPD sebanyak 12 bulan. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 78.874.000,-
  - b) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 15.000.000,-
  - c) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp. 15.000.000,-
4. Kegiatan Umum Perangkat Daerah Rp. 917.649.700,- Indikatornya adalah Terlaksananya administrasi Umum OPD sebanyak 12 bulan. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 16.140.120,-
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 8.000.000,-
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 17.296.800,-
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 30.000.000,-
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 73.444.700,-
  - f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 35.800.000,-
  - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 736.968.000,-
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 577.625.500,- indikatornya terlaksananya pengadaan barang milik daerah di OPD sebanyak 30 unit. Sub kegiatannya sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 577.625.500,-
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.016.986.200,- indikatornya adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD sebanyak 12 bulan. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 374.090.000,-
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 642.896.200,-
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 369.968.800,- indikatornya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di OPD sebanyak 60 unit. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 54.390.000,-
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 288.078.800,-
  - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 27.500.000,-

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

**1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Rp. 1.065.960.000, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 437.460.000,- indikator kegiatan terfasilitasinya pelayanan izin usaha simpan pinjam di 15 kabupaten/kota dengan sub kegiatan yaitu :
  - a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 437.460.000,- dengan indikator sub kegiatan yaitu jumlah kelompok yang disuluh sebanyak 100 kelompok
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 592.500.000,- indikator kegiatannya adalah

terfasilitasinya akta pendirian koperasi sebanyak 100 koperasi dengan sub kegiatannya yaitu :

- a) Sub kegiatan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 592.500.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah jumlah koperasi yang difasilitasi izin nya sebanyak 100 koperasi

**2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 125.599.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 125.599.000,- dengan indikator kegiatannya adalah jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa kelembagaan dan usahanya serta kepatuhannya sebanyak 65 koperasi. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- a) Sub kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat Rp. 62.081.000,- dengan indikatornya yaitu Jumlah Koperasi yang diawasi/diperiksa Kelembagaan dan Usahanya sebanyak 30 koperasi
- b) Sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel Rp. 63.518.000,- indikatornya adalah Jumlah Koperasi yang telah diperiksa kepatuhan terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 35 koperasi

**3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 83.039.000,- terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 83.039.000,-



indikatornya adalah Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya sebanyak 40 koperasi dengan sub kegiatan yaitu :

- a) Sub kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Rp. 83.039.000,- dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi yang telah dinilai permodalannya, kualitas aktifa produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri, dan pertumbuhan serta kemandiriannya sebanyak 40 koperasi.

**4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 2.677.080.000,-  
Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :**

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 2.677.080.000,- indikatornya adalah Meningkatnya Pengetahuan SDM Koperasi dan Pelaku UMKM sebanyak 845 KUMKM

- a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 2.677.080.000,- indikatornya adalah Jumlah pelaku koperasi dan pelaku UMKM yang dilatih sebanyak 845 orang

**Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 2.352.080.000,-** (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan umkm sebanyak 19 Pelatihan dengan total peserta yang dilatih sebanyak 696 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2021

NO	DIKLAT DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	LOKASI
1	Bimtek tenaga pendamping	25 orang	Provinsi Lampung
2	Pelatihan start up capital bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung
3	Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha tani wanita	40 orang	Provinsi Lampung
4	Pelatihan peningkatan resiliensi bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung
5	Pelatihan akutansi koperasi pola syariah	40 orang	Provinsi Lampung
6	Pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus/pengawas RAT	35 orang	Provinsi Lampung

NO	DIKLAT DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	LOKASI
7	Pelatihan desain label dan kemasan produk bagi umkm	40 orang	Provinsi Lampung
8	Pelatihan pembukuan digital bagi koperasi sektor riil	40 orang	Provinsi Lampung
9	Pelatihan kompetensi bagi customer service ksp/usp dan kspps/uspps	35 orang	Provinsi Lampung
10	Pelatihan kompetensi bagi juru tagih ksp/usp dan kspps/uspps	35 orang	Provinsi Lampung
11	Pelatihan manajemen ekosistem perkoperasian	40 orang	Provinsi Lampung
12	Pelatihan vocational bidang kerajinan di Tulang Bawang	35 orang	Tulang Bawang
13	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman di Lampung Barat	35 orang	Lampung Barat
14	Pelatihan vocational bidang pariwisata di Pesisir Barat	35 orang	Pesisir Barat
15	Pelatihan vocational desain produk bagi umkm	35 orang	Provinsi Lampung
16	Pelatihan vocational bidang makanan dan minuman di Way Kanan	35 Orang	Way Kanan
17	Pelatihan vocational bidang hortikultura di Lampung Selatan	35 Orang	Lampung Selatan
18	Pelatihan adaptasi umkm menghadapi new normal	35 orang	Provinsi Lampung
19	Pelatihan kepemimpinan koperasi berbasis ekosistem	35 orang	Provinsi Lampung

## 5. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp.

**344.336.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 344.336.000,- indikator kegiatannya adalah Terlaksananya Kegiatan Koperasi yang Meliputi Akses Pasar Pembiayaan Kelembagaan Penataan Manajemen Restrukturisasi Usaha dengan target 105 koperasi. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. Rp. 344.336.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Koperasi yang meningkatkan daya saing usaha Koperasi dari sisi permodalan, pemasaran dan jaringan usahanya sebanyak 105 koperasi

**6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.162.835.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.162.835.000,- indikator kegiatannya adalah Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Usaha bagi UMKM sebanyak 100 UMKM. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. Rp. 1.162.835.000,- indikator sub kegiatannya adalah Jumlah UMKM yang dibina dengan target 100 UMKM

**7. Program Pengembangan UMKM Rp. 347.503.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :**

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 347.503.000,- indikator kegiatannya adalah Meningkatnya skala usaha UMKM, pendampingan bagi UMKM, pemasaran produk UMKM dan kinerja layanan PLUT dengan target 210 UMKM. Sub kegiatannya sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 347.503.000,- dengan indikator sub kegiatannya adalah Terlaksananya pelatihan vocational bagi UMKM, bazar produk UMKM dan pengadministrasian PLUT dengan target 210 UMKM

## **V. PENUTUP**

Penyusunan RENJA Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya RENJA Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2021 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.

# LAMPIRAN

## TABEL KERJA

## PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Nama OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	2	17	2
2	11	18	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinasi Kelembagaan dan up-dating Data Keragaan Koperasi	Jumlah Peserta Koordinasi Kelembagaan dan Up-Dating Data Keragaan Koperasi	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	17	2
2	11	18	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyuluhan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Tatalaksana Perizinannya	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	11	18		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2	2	17	2
2	11	18	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penguatan Organisasi, Tata Kelola Koperasi dan Pendampingan RAT	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1		2	2	17	2
2	11	18	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah Koperasi yang Berprestasi	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1		2	2	17	2
2	11	2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	2	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	3	1	17	2
2	11	2	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	3	1	17	2
2	11	2	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29	3	1	17	2
2	11	2	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	3	1	17	2
2	11	2	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33	3	1	17	2
2	11	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	17	2



PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	3	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Pelayanan Informasi Publik	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	17	2
2	11	3		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4	1	17	2
2	11	3	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	4	1	17	2
2	11	3	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Persentase Capaian Kinerja dan Kehadiran Bulanan	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	1	17	2
2	11	3	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	4	1	17	2
2	11	4		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	4	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	1	1	17	2
2	11	4	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	1	17	2
2	11	4	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	1	1	17	2
2	11	4		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan			Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	1	17	2
2	11	4	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan OPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	2	1	17	2
2	11	4	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan OPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	2	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	4		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	17	2
2	11	4	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Implementasi Aplikasi e- Government dan Pameran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Implementasi Aplikasi e- Government dan Pameran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	17	2
2	11	4	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	3	1	17	2
2	11	4		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	7	17	2
2	11	4		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan			Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	8	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	1		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3	1	17	2
2	11	1	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	3	1	17	2
2	11	1	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	17	2
2	11	1	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	3	1	17	2
2	11	1	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan Perbaikan Peralatan Kantor	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	3	1	17	2
2	11	1	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	3	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	1	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	3	1	17	2
2	11	1	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	3	1	17	2
2	11	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	3	1	17	2
2	11	1	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	3	1	17	2
2	11	1	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Implementasi Aplikasi e-Government dan Pameran	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	3	1	17	2
2	11	1	10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan Minum	Penyediaan Makanan dan Minuman		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	3	1	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	11	1	11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	3	1	17	2	
2	11	1	12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	17	2	
2	11	1	13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	3	1	17	2	
2	11	20		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Daya Saing Usahanya dari sisi Permodalan, Pemasaran dan Jaringan Usaha			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1	6	17	2
2	11	20	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Usahanya	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	17	2	
2	11	20	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Berkembang dan Terlindungi usahanya	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	17	2	

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	20	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Akses Permodalan Bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina akses permodalannya	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	6	17	2
2	11	21		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang ditindak lanjuti			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	3	17	2
2	11	21	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengawasan penerapan aturan perkoperasian dan pemberian sanksi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	3	17	2
2	11	21	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa Kelembagaan dan Usahanya	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	17	2
2	11	21		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang ditindak lanjuti			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	4	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	11	21	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	1	4	17	2	
2	11	22		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Persentase sdm Koperasi dan UMKM yang meningkat kualitasnya			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1	5	17	2
2	11	22	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan fasilitas layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	Persentase Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2	
2	11	22	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM	Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2	
2	11	22	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Peserta Pelatihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2	



PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	22	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2
2	11	22	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Vocasional	Jumlah Peserta Pelatihan Vocasional	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2
2	11	22	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Koperasi	Jumlah Peserta Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2
2	11	22	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Akuntansi	Jumlah Peserta Pelatihan Akuntansi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2
2	11	22	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	22	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	5	17	2
2	11	23		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing Usahanya (UMKM)			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	7	17	2
2	11	23	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Identifikasi dan Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi Produk bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan sosialisasi dan sertifikat (Halal, SNI, HKI, Keamanan Pangan dan obat, dll)	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2
2	11	23	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembinaan dan Pengembangan Sentra UMKM	Jumlah Sentra UMKM yang di Bina	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	23	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendataan dan Pembinaan UMKM	Jumlah Sinkronisasi Data UMKM dan Jumlah UMKM yang dibina	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2
2	11	23	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Transplantasi UMKM Keluar Provinsi	Jumlah UMKM yang mengikuti Transplantasi	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2
2	11	23	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Temu Konsultasi Pemberdayaan Usaha UMKM	Jumlah Peserta Temu Konsultasi Pemberdayaan Usaha UMKM	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	23	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina dan dikembangkan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2
2	11	23	7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembinaan Kelompok Usaha Pemula	Jumlah Kelompok Wirausaha Pemula yang dibina	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2
2	11	23	8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan dan Promosi Produk-Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta Pameran dan Promosi Produk-produk UMKM	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	23	9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi bagi UMKM	Jumlah Pembinaan UMKM	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	7	17	2
2	11	23		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing Usahanya (UMKM)			Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	8	17	2
2	11	24		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir			Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	8	17	2
2	11	24	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Study Komparasi Penguatan Pembiayaan KUMKM	Jumlah Study Komparasi Penguatan Pembiayaan KUMKM	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	24	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Evaluasi Kinerja Pelayanan Pembiayaan KUMKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pelayanan Pembiayaan KUMKM	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	24	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sosialisasi Inisiasi Pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi KUMKM	Jumlah Sosialisasi Pembentukan Lembaga Pembiayaan bagi KUMKM	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	24	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendampingan Usaha bagi Calon/Penerima Dana Bergulir	Jumlah Calon/ Penerima Dana Bergulir yang didampingi Usahanya	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	24	5	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM	Persentase Peningkatan Layanan Pembiayaan bagi KUMKM	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	24	6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diklat Perkuatan Modal dan Usaha bagi KUMKM Calon/Penerima Dana Bergulir	Jumlah Peserta Diklat Perkuatan Modal dan Usaha bagi KUMKM Calon/Penerima Dana Bergulir	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	25		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pendampingan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM			Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	8	17	2
2	11	25	1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	Persentase Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2

PERMENDAGRI 13/RPJM/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	11	25	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	Jumlah KUMKM yang berkembang (Kualitas Produknya, Akses Pemasarannya, Jaringan Usaha dan Promosinya) dengan mengikuti Pameran/Bazar/Promosi Produk KUMKM dan Melakukan dan Melaksanakan Pemasaran Produk secara e-commerce	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	25	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	Jumlah KUMKM yang Meningkatkan Skala Usahanya dengan melakukan Temu Usaha, Pendampingan dalam Pembuatan Laporan Keuangan secara Online/Offline, Pengurusan SIUMK dan PIRT	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2
2	11	25	4	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penguatan Kelembagaan dan SDM bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	Jumlah KUMKM yang menguat Kelembagaan dan SDMnya	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	8	17	2

**RENCANA KERJA**  
**BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
		INDIKATOR	TARGET			
<b>A DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG</b>						
I.						
2. 17. 01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja OPD</b>	<b>100%</b>	<b>Prov. Lampung</b>	<b>13,986,685,000.00</b>	
2. 17. 01. 1. 01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD</b>	<b>100%</b>	<b>Prov. Lampung</b>	<b>225,760,800.00</b>	
2. 17. 01. 1. 01. 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	13 Dokumen	Prov. Lampung	185,060,000.00	
2. 17. 01. 1. 01. 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	11 Dokumen	Prov. Lampung	40,700,800.00	
2. 17. 01. 1. 02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi Keuangan OPD</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Prov. Lampung</b>	<b>11,025,690,000.00</b>	
2. 17. 01. 1. 02. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji ASN	12 bulan	Prov. Lampung	10,995,690,000.00	
2. 17. 01. 1. 02. 07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan laporan keuangan/semesteran	17 dokumen	Prov. Lampung	30,000,000.00	
2. 17. 01. 1. 05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian OPD</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Prov. Lampung</b>	<b>137,457,000.00</b>	
2. 17. 01. 1. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	4 orang	Dalam dan luar provinsi	107,457,000	
2. 17. 01. 1. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	100 orang	Provinsi Lampung	15,000,000	
2. 17. 01. 1. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis	100 orang	Provinsi Lampung	15,000,000	
2. 17. 01. 1. 06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum OPD</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Prov. Lampung</b>	<b>935,229,500.00</b>	



KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
		INDIKATOR	TARGET			
2. 17. 01. 1. 06. 01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	135 buah	Provinsi Lampung	20,000,000	
2. 17. 01. 1. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	25 buah	Provinsi Lampung	20,000,000	
2. 17. 01. 1. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia	8 buah	Provinsi Lampung	17,296,800	
2. 17. 01. 1. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Provinsi Lampung	5,200,000	
2. 17. 01. 1. 06. 07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah bahan material yang tersedia	31 buah	Provinsi Lampung	73,444,700	
2. 17. 01. 1. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu dalam 1 tahun	24 kali	Provinsi Lampung	35,800,000	
2. 17. 01. 1. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun	47 kali	Provinsi Lampung	763,488,000	
<b>2. 17. 01. 1. 07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah di OPD</b>	<b>30 unit</b>	<b>Prov. Lampung</b>	<b>502,625,500.00</b>	
2. 17. 01. 1. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg tersedia	30 unit	Provinsi Lampung	502,625,500	
<b>2. 17. 01. 1. 08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Prov. Lampung</b>	<b>789,953,400.00</b>	
2. 17. 01. 1. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Provinsi Lampung	325,947,000	
2. 17. 01. 1. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Provinsi Lampung	464,006,400	
<b>2. 17. 01. 1. 09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di OPD</b>	<b>60 unit</b>	<b>Prov. Lampung</b>	<b>369,968,800.00</b>	
2. 17. 01. 1. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 unit	Provinsi Lampung	54,390,000	
2. 17. 01. 1. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	9 unit	Provinsi Lampung	288,078,800	
2. 17. 01. 1. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	50 unit	Provinsi Lampung	27,500,000	

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
		INDIKATOR	TARGET			
2. 17. 02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	100 Persen	Provinsi Lampung	1,065,960,000.00	
2. 17. 02. 1. 01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	15 Kab/Kota	Provinsi Lampung	473,460,000.00	
2. 17. 02. 1. 01. 01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok yang disuluh	100 Kelompok	lampung selatan, Lampung Utara, Mesuji, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Way Kanan	473,460,000.00	
2. 17. 02. 1. 02.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Terfasilitasinya Akta Pendirian Koperasi	100 koperasi	Provinsi Lampung	592,500,000.00	
2. 17. 02. 1. 02. 01.	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi izin nya	100 koperasi	Provinsi Lampung	592,500,000.00	
2. 17. 03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100 Persen	Provinsi Lampung	125,599,000.00	
2. 17. 03. 1. 01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi/diperiksa kelembagaan dan Usahanya serta Kepatuhan	65 Koperasi	Provinsi Lampung	125,599,000.00	
2. 17. 03. 1. 01. 01.	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang diawasi/diperiksa Kelembagaan dan Usahanya	30 Koperasi	Provinsi Lampung	62,081,000.00	

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
		INDIKATOR	TARGET			
2. 17. 03. 1. 01. 02.	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandiri Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang telah diperiksa kepatuhan terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan	35 Koperasi	Provinsi Lampung	63,518,000.00	
2. 17. 04.	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>83,039,000.00</b>	
2. 17. 04. 1. 01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	40 Koperasi	Provinsi Lampung	83,039,000.00	
2. 17. 04. 1. 01. 02.	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dinilai permodalannya, kualitas aktifa produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri, dan pertumbuhan serta kemandiriannya	40 Koperasi	Provinsi Lampung	83,039,000.00	
2. 17. 05.	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Peningkatan SDM KUMKM</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>2,677,080,000.00</b>	
2. 17. 05. 1. 01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengetahuan SDM Koperasi dan Pelaku UMKM	845 UMKM	Provinsi Lampung	2,677,080,000.00	
2. 17. 05. 1. 01. 01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pelaku koperasi dan pelaku UMKM yang dilatih	845 UMKM	Provinsi Lampung	2,677,080,000.00	
2. 17. 06.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>344,336,000.00</b>	
2. 17. 06. 1. 01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koperasi yang Meliputi Akses Pasar Pembiayaan Kelembagaan Penataan Manajemen Restruktisasi Usaha	105 Koperasi	Provinsi Lampung	344,336,000.00	

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
		INDIKATOR	TARGET			
2. 17. 06. 1. 01. 02.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang meningkat daya saing usaha Koperasi dari sisi permodalan, pemasaran dan jaringan usahanya	105 Koperasi	Meto, Lampung Timur,Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat	344,336,000.00	
2. 17. 07.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Pembinaan dan penguatan UMKM</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>1,162,835,000.00</b>	
2. 17. 07. 1. 01.	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Usaha bagi UMKM</b>	<b>50 UMKM</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>1,162,835,000.00</b>	
2. 17. 07. 1. 01. 01.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang dibina	50 UMKM	1. Tanggamus Kec. Pugung ds.tangkit serdang; 2. pesawaran kec.negerikaton, 3. Pringsewu kec.pugung,4. Way Kanan 5. Pesbar; 6. Mesuji	1,162,835,000.00	
2. 17. 08.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Peningkatan Layanan dan Pengembangan UMKM</b>	<b>100 persen</b>	<b>PesBar, TubaBar, dan Balam</b>	<b>347,503,000.00</b>	
2. 17. 08. 1. 01.	<b>Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Meningkatnya skala usaha UMKM, pendampingan bagi UMKM, pemasaran produk UMKM dan kinerja layanan PLUT</b>	<b>210 UMKM</b>	<b>PesBar, TubaBar, dan Balam</b>	<b>347,503,000.00</b>	

KODE REK	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
		INDIKATOR	TARGET			
2. 17. 08. 1. 01. 01.	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya pelatihan vocational bagi UMKM, bazar produk UMKM dan pengadministrasian PLUT	210 UMKM	PesBar, TubaBar, dan Balam	347,503,000.00	
<b>JUMLAH</b>					<b>19,793,037,000.00</b>	

BANDAR LAMPUNG, JULI 2020

KEPALA DINAS

**Dr. AGUS NOMPITU, S.E., M.T.P.**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19670831 199303 1 006